

Volume 3 | No.1 | Edisi : Januari - Juni 2014 | ISSN : 2302-4585

# JURNAL *Kompetitif*



**FAKULTAS EKONOMI**  
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kompetitif	Vol. 3	No. 1	Hal: 1- 153	Palembang, Januari 2014	ISSN: 2302 - 4585
------------	--------	-------	-------------	-------------------------	-------------------

# KOMPETITIF

---

**Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang**

## DAFTAR ISI

Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Kemampuan Intelektuil Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Prof Dr.H.Sulbahri Madjir,SE.MM	1 – 13
Analisis Realisasi Penggunaan Anggaran Biaya Pemeliharaan Pada PT Semen Baturaja (Persero) Site Baturaja Eka Ery Wati,SE.MSi	14 – 29
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang Sugiri Dinah,SE.MSi, Surya Adi Barka	30 – 44
Pengaruh Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Baidhowi Abdi SE.MP	45 – 55
Pengaruh Insentif dan Reward Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan PT PLN (PERSERO) WS2JB Umi Hasanah,SE.MM	56 – 65
Analisis Sikap dan Norma Subyektif Mahasiswa Terhadap Minat Masuk Pada Universitas Tridinanti Palembang. Rudy Chairuddin,SE.Msi	66 - 83
Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Ellen Sumiarni,SE.MM	84 – 101
Analisis Kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Kayu Agung Rusmida Jun Harahap, SE.MM	102– 118
Analisis Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Dan dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Hasyunah,SE.MM	119– 139
Pengaruh Iklim Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Alinadia,SE.MM	140 –153

## ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

*Hasyunah \*)*

### ABSTRACT

*This study aimed to determine the effect of region income of Local Government Expenditures in Banyuasin, to determine the effect of Revenue Sharing on Local Government Expenditures Banyuasin and to know the effect of Local Revenue Equalization Fund of Local Government Expenditures in Banyuasin. Regional Revenue Contribution to the shopping area is still very low at an average of 23.4% with an average increase of 0.11% per year. While most of the district government expenditures amounted to 93.49% in Banyuasin funds come from fund balance. While the balance fund contributions to local spending is as high as an average of 93.49% with a decrease of 1.58% per year. Trend region income increasing and balancing the increasingly indicate that the development of independence in Banyuasin County Government for its budget each year has increased. This indicates that the District Government has been trying Banyuasin independent in managing the financial area and try to be autonomous in accordance with the goals you want to target in the regional autonomy that is the achievement of fiscal autonomy of a region. Also in Banyuasin regency government has been trying to reduce its dependence on transfers from the central / provincial financial manage their areas and strive to create and explore more potential derived from its own country.*

**Keywords:** *Contributions, Fund Balance and Expenditure*

### A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah Daerah Musi Banyuasin dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat. Sumber PAD

merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Struktur komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2004-2006 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Berikut ini adalah rincian komponen Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Musi

---

\*)Dosen Fakultas Ekonomi UTP

Banyuasin untuk Periode 2004-2006. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- c. Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Struktur komponen pendapatan transfer dana perimbangan di Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2004-2006 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian dari dana perimbangan pada Kabupaten Musi Banyuasin periode 2004-2006 yaitu sebagai berikut :

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. Dana Perimbangan dari Provinsi

Struktur Komponen Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2004-2006 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian dari belanja

daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin periode 2004-2006 terbagi atas :

- a. Belanja Aparatur Daerah
- b. Belanja Pelayanan Publik
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- d. Belanja Tidak Tersangka

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang alokasikan kepada daerah berdasarkan peraturan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005). Dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah. Peran dana perimbangan di Kabupaten Musi Banyuasin sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di domosili oleh jumlah dana perimbangan dari pada pendapatan asli daerah. Setiap transfer dari pusat (dana perimbangan) yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer

dari pusat yang diterima daerah lebih besar.

Struktur komponen dana perimbangan di Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007 berdasarkan pada UU No.17 Tahun 2003 dan Draf Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada struktur dana perimbangan terdapat perbedaan antara periode 2004-2006 dan 2007. Pada periode 2004-2006, struktur komponen APBD yang merupakan bantuan dari pemerintah dicantumkan sebagai dana perimbangan yang akan dibagi-bagi lagi ke beberapa kategori, akan tetapi pada periode 2007, bantuan yang berasal dari pemerintah disebut sebagai Pendapatan Transfer.

Pada struktur Belanja Daerah terdapat perbedaan pengelompokan kategori dan jenis belanja antara periode 2004-2006 dan 2007. Pada periode 2004-2006, Belanja Daerah terdiri atas belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Masing-masing belanja tersebut akan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok belanja. Akan tetapi pada periode 2007, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja

operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap Kabupaten dan Kota di Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Dampak langsung atas penerapan otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD, yang dipakai untuk membiayai belanja pemerintah daerah berupa belanja langsung dan tidak langsung. Namun, dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari dana bagi

hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DOK).

Kebijakan ekonomi daerah memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) dari pada mengoptimalkan pendapatan sendiri (PAD) untuk membiayai belanja daerahnya.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Dalam upaya peningkatan kemandirian, pemerintah daerah juga dituntut

untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Adanya peningkatan alokasi waktu diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan belanja pemerintah yang tidak efisien. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dalam jangka panjang ketergantungan ini seharusnya dikurangi karena akan berdampak negatif pada kemandirian daerah.

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pada saat ini di Indonesia otonomi daerah sudah berjalan, tapi kenyataannya setiap daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur rumah tangganya masing-masing. Secara langsung penerapan otonomi daerah berdampak pada kebutuhan dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Nordiwan, 2007 : 181)

## **2. Dana Perimbangan**

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari

pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh

## **3. Belanja Daerah**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

## **B.METODE PENELITIAN**

### **1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

Data adalah sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) langsung atau survey. Sumber data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Sumber data dalam melakukan suatu penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

(tidak melalui media perantara).  
Data primer secara khusus  
dikumpulkan oleh peneliti untuk  
menjawab pertanyaan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Secara tidak langsung sumber  
data penelitian yang diperoleh  
peneliti secara tidak langsung  
melalui media perantara  
(diperoleh dan dicatat oleh pihak  
lain).

Objek penelitian yang akan  
digunakan adalah struktur anggaran  
pendapatan Asli Daerah dalam era  
otonomi daerah yaitu tahun 2004 –  
2007.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data  
dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan menggunakan,  
mengumpulkan dan  
mempelajari buku-buku,  
literatur-literatur serta artikel-  
artikel yang berhubungan  
dengan masalah yang akan  
dibahas dalam penelitian ini.

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Adapun teknik pengumpulan  
data yang akan digunakan

yaitu teknik dokumentasi  
yaitu melalui penyelidikan  
sumber dokumen yang  
dibutuhkan. Dalam hal ini  
penulis mengumpulkan data  
dengan mencari data berupa  
APBD atau laporan realisasi  
Anggaran Pemerintah Daerah  
Musi Banyuasin.

## 2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah  
rekayasa operasional bagaimana  
sebuah penelitian akan dilaksanakan  
dalam rangka meminimalkan unsur  
kekeliruan (error). Pendekatan ilmu  
dan teori yang digunakan dalam  
penelitian ini adalah pendekatan Ilmu  
Akuntansi Sektor Publik dan secara  
lebih khusus pada aspek Pendapatan  
Asli Daerah dan Dana Perimbangan  
Belanja Daerah Pemerintah  
Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam  
penelitian ini penulis menggunakan  
dua cara teknik analisis yaitu analisis  
kuantitatif, menganalisis dan menilai  
semua data finansial berupa  
ringkasan Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Daerah (APBD) dan Analisis  
Kualitatif yaitu dengan menganalisis  
dan menilai semua data yang  
diperoleh dari objek penelitian serta  
membandingkannya dengan teori-



teori dan ketentuan yang berlaku umum.

### **3. Variabel dan Definisi Operasional**

Variabel adalah sebuah atribut atau sifat dari objek yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini variabelnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber-sumber data untuk dijadikan sebuah sampel. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen serta catatan yang dimiliki oleh peneliti.

### **5. Teknik Analisis**

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan dianalisis sehingga dapat simpulkan suatu jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis dilakukan dengan

menggunakan analisis rasio dan analisis trend.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Rasio dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah**

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi dana perimbangan terhadap pengalokasian belanja pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun secara sebagian. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana pusat dalam pengalokasian belanja daerahnya.

Rasio ini menunjukkan besar kecilnya dana yang berasal dari pusat yang berupa dana perimbangan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kegiatan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang bersifat rutin maupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk investasi dan mendirikan sarana dan prasarana pembangunan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula tingkat penggunaan dana perimbangan dalam pengalokasian

belanja pemerintah daerah baik secara keseluruhan maupun sebagian.

**Tabel 1. Perhitungan Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004-2007**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Dana Perimbangan (DP)</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Rasio (DP/Belanja)</b>
2004	559.049.643.406,00	530.829.209.890,37	95,77%
2005	579.714.152.140,00	586.636.405.200,00	96,58%
2006	1.085.674.368.855,35	1.154.746.561.167,03	96,31%
2007	1.222.066.034.495,00	1,432,741,384,143,00	85,30%
Rata-Rata			93,49%

**Tabel 2. Kontribusi Sumber Dana Perimbangan dalam Pembentukan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2004-2007**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Komponen Dana Perimbangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kontribusi terhadap Dana Perimbangan</b>
<b>2004</b>	Bagi hasil pajak & Bukan Pajak	404.544.425.006,00	73,36%
	Dana Alokasi Umum	145.336.000.000,00	26,00%
	Dana Alokasi Khusus	0,00	00,00%
	Bantuan Keuangan Provinsi	9.169.218.400,00	1,64%
	<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>559.049.643.406,00</b>	
<b>2005</b>	Bagi hasil pajak & Bukan Pajak	400.529.546.140,00	73,36%
	Dana Alokasi Umum	145.336.000.000,00	25,07%
	Dana Alokasi Khusus	25.694.000,00	0,004%
	Bantuan Keuangan Provinsi	33.822.912.000,00	5,83%
	<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>579.714.152.140,00</b>	
<b>2006</b>	Bagi hasil pajak & Bukan Pajak	913.879.903.300,35	84,17%
	Dana Alokasi Umum	144.827.166.400,00	13,34%
	Dana Alokasi Khusus	12.109.900.000,00	1,12%
	Bantuan Keuangan Provinsi	14.857.399.155,00	1,37%
	<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>1.085.674.368.855,35</b>	
<b>2007</b>	Bagi hasil pajak	209.044.265.559,00	17,11%
	Dana Alokasi Umum	190.145.000.000,00	63,31%
	Dana Alokasi Khusus	49.136.000.000,00	15,56%
	Bantuan Keuangan Provinsi	773.740.768.936,00	4,02%
	<b>Total Dana Perimbangan</b>	<b>1.222.066.034.495,00</b>	

Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan dalam tabel diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 4 tahun (2004-2007) rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah

secara total mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu dengan rata-rata 93,49% per tahun. Besarnya jumlah dana perimbangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar

dana yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari transfer pusat/provinsi dalam membiayai belanja daerahnya sehingga untuk belanja daerah pun dalam jumlah yang besar.

Sebaliknya penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa semakin meningkatnya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pusat/provinsi untuk membiayai belanja daerahnya. Selain itu angka ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin giat untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dan sebaliknya tingkat ketergantungannya dapat dikurangi.

Penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah ini disebabkan adanya penurunan dari sebagian besar komponen dana perimbangan itu sendiri. Analisis tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dana perimbangan akan

dapat membiayai belanja daerahnya rata-rata sebesar 93,49% per tahun selama kurun waktu 4 tahun (2004-2007).

#### **a. Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004**

Dalam tahun anggaran 2004, rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah sebesar 95,77% setelah dikurangi dengan kontribusi dari PAD dan lain-lain pendapatan. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 95,77% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sumber pendanaannya berasal dari dana perimbangan sedangkan sisanya sebesar 4,23 berasal dari PAD dan lain-lain pendapatan. Tingginya rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah dapat dilihat dari besarnya komponen-komponen dana perimbangan itu sendiri.

Komponen dana perimbangan yang paling tinggi adalah berupa dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar Rp.404.544.425.006,00 atau sebesar 72,36% dari total dana perimbangan. Komponen selanjutnya adalah berasal dari dana alokasi umum yang

dialokasikan sebesar Rp.145.336.000.000,00 atau sebesar 26% dari total dana perimbangan selanjutnya adalah komponen berupa bantuan keuangan dari provinsi yang hanya menyumbang sebesar Rp.9.169.218.400,00 atau sebesar 1,64% dari total dana perimbangan sedangkan komponen dari dana perimbangan yang berupa dan alokasi khusus tidak ada.

**b. Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005**

Dalam tahun anggaran 2005 rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah secara total mengalami peningkatan yang cukup rendah sebesar 0,81% dari periode sebelumnya yaitu dari 99,75% menjadi 96,58%. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam pengalokasian untuk belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini berarti bahwa sebesar 96,58% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sumber pendanaannya dan sisanya sebesar 3,42% berasal pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya.

Sama halnya dengan tahun anggaran sebelumnya yaitu rasio PAD terhadap belanja daerah juga mengalami peningkatan begitu juga dengan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah juga meningkat. Peningkatan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah ini akan membawa dampak yang kurang baik dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah dikarenakan dengan tingginya rasio ini berarti tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin baik untuk membiayai pengeluaran yang bersifat investasi untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat lebih banyak berasal dari dana perimbangan.

Selanjutnya rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah tahun 2005 disebabkan oleh peningkatan jumlah dana perimbangan sebesar 3,70% menjadi Rp.579.714.152/140,00 dibandingkan dengan periode

sebelumnya yang hanya sebesar Rp.559.049.643.406,00. Peningkatan ini disebabkan terjadinya peningkatan yang cukup besar dari beberapa komponen dana perimbangan yaitu terjadi peningkatan pada komponen bantuan keuangan provinsi, adanya alokasi untuk dana alokasi khusus yang semula pada tahun 2004 tidak mengalokasikan. Peningkatan komponen ini cukup berpengaruh pada kenaikan total dana perimbangan walaupun komponen lainnya mengalami penurunan atau bahkan jumlahnya tetap seperti pada periode sebelumnya.

Komponen tersebut masing-masing adalah komponen bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta komponen dana alokasi umum. Komponen bantuan keuangan provinsi meningkat menjadi Rp.33.822.912.000,00 dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yang hanya sebesar Rp.9.169.218.400,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,69% dari total dana perimbangan yaitu yang semula 1,64% menjadi 5,83%. Komponen dana alokasi khusus juga mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2004 tidak

dialokasikan akan tetapi pada tahun 2005 dialokasikan sebesar Rp.25.694.000,00 atau sebesar 0,004% dari total dana perimbangan.

Meskipun pengalokasian untuk dana alokasi khusus ini cukup rendah namun hal ini cukup membawa dampak dan pengaruh pada meningkatnya jumlah dana perimbangan secara total. Dengan demikian komponen dana perimbangan yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah berasal dari bantuan keuangan provinsi yaitu menjadi sebesar 5,83% dari total dana perimbangan.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masing-masing mengantungkan dirinya pada bantuan keuangan dari pihak luar dalam pembiayaan untuk belanja daerahnya. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya dapat mengurangi ketergantungan ini dalam jangka panjang untuk membiayai pengeluaran daerahnya tentunya dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD-nya.

### **c. Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006**

Dalam tahun anggaran 2006 rasio dana perimbangan terhadap belanja daerahnya secara total mengalami penurunan namun sangat rendah yaitu turun sebesar 0,27% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2005) yaitu dari 96,58% menjadi 96,31% dan turun sebesar 0,54% bila dibandingkan dengan tahun 2004. Hal ini berarti bahwa sebesar 96,31% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sumber pendanaannya berasal dari dana perimbangan dan sisanya sebesar 3,69% berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat ketika pada tahun 2005 rasio ii mengalami kenaikan dan selanjutnya pada tahun 2006 rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah mengalami penurunan.

Dengan demikian pemanfaatan dana perimbangan untuk belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

mengalami fluktuasi dari tahun 2004-2006. Berbeda dengan perhitungan sebelumnya yaitu rasio terhadap belanja daerah yang mengalami peningkatan akan tetapi rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah mengalami penurunan. Penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah ini merupakan suatu hal yang positif karena ini berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin berkurang dan ditandai dengan peningkatan rasio PAD terhadap belanja daerah Musi Banyuasin meskipun dengan angka yang masih rendah. Walaupun demikian penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah yang cukup rendah ini menunjukkan bahwa ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari luar.

Selanjutnya penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah tahun 2006 disebabkan oleh penurunan dari komponen dana perimbangan itu sendiri dan adanya peningkatan jumlah total belanja secara keseluruhan menjadi Rp.1.1.54.746.561.167,03

dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2005 hanya sebesar Rp.586.636.405.200,00. Penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah yang rendah ini disebabkan penurunan pada komponen dana perimbangan yang berupa dana alokasi umum yang menjadi 144.827.166.400,00 atau sebesar 13,34% dari total dana perimbangan dibandingkan periode tahun sebelumnya yakni tahun 2005 yang mencapai Rp.145.336.000.000,00 atau sebesar 25,07% dari total dana perimbangan.

Begitu juga halnya dengan komponen bantuan keuangan provinsi yang mengalami penurunan menjadi Rp.14.857.399.155,00 atau sebesar 1,37% dari total dana perimbangan dibandingkan periode tahun sebelumnya yakni tahun 2005 yang mencapai Rp.33.822.912.000,00 atau sebesar 5,83% dari total dana perimbangan, meskipun komponen dana perimbangan yang lain (bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta dana alokasi khusus) mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan rasio dana

perimbangan terhadap belanja daerah, akan tetapi hal ini berpengaruh pada meningkatnya jumlah dana perimbangan secara total.

Walaupun terjadi peningkatan dana perimbangan secara total akan tetapi besarnya alokasi untuk belanja daerah menyebabkan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah menjadi turun. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menunjukkan upayanya dalam mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pihak luar khususnya berupa transfer dari pemerintah pusat, meskipun penurunannya cenderung masih rendah.

#### **d. Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007**

Dalam tahun anggaran 2007 rasio dana perimbangan terhadap belanja daerahnya secara total mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 11,01% dari periode sebelumnya yaitu dari 96,31% menjadi 85,30%. Tingkat penurunan ini jika dibandingkan dengan periode awal yakni tahun 2004 dan 2005 rasio dana perimbangan terhadap

belanja daerah mengalami penurunan yakni masing-masing sebesar 10,47% dari periode tahun 2004 dan sebesar 11,28% dari periode tahun 2005. Angka ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun yaitu 2005-2007 rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian tingkat penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah selama kurun waktu 3 tahun tersebut telah menunjukan hasil yang positif pada arah perkembangan dan pencapaian tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal pembiayaan untuk belanja daerahnya. Rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah sebesar 85,30% pada tahun 2007 menunjukkan bahwa sebesar 85,30% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sumber pendanaannya berasal dari dana perimbangan sedangkan sisanya 14,70% berasal dari pendapata asli daerah dan penerimaan lain-lainnya.

Selanjutnya penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah ini tidak disebabkan oleh

menurunnya jumlah dana perimbangan secara total akan tetapi hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan yang cukup signifikan pada komponen dana perimbangan yang berupa dana bagi hasil pajak. Pada tahun 2007 komponen dana bagi hasil pajak hanya sebesar Rp.209.044.265.529,00 atau sebesar 17,11% dari total dana perimbangan. Jumlah ini berbeda dengan periode sebelumnya yaitu pada tahun 2006, komponen dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak mencapai Rp.913.879.903.300,35 atau sebesar 84,14% dari total dana perimbangan.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang sangat drastis dalam hal komponen dana perimbangan yang berupa dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 67,07% dari total dana perimbangan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2005). Selain itu, penurunan ini juga disebabkan adanya pengalokasian pada komponen dana bagi hasil buka pajak yang dipisaj dengan dana bagi hasil pajak sehingga jumlah dana bagi hasil pajak menjadi menurun. Berbeda dengan periode sebelumnya dana bagi hasil pajak dan bagi hasil



bukan pajak dikelompokkan atau dijumlahkan secara total dalam satu kesatuan kelompok yang mengakibatkan total untuk komponen ini menjadi besar pada tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2007 dan bagi hasil pajak menjadi satu kesatuan komponen yang berdiri sendiri dan terpisah dengan dana bagi hasil bukan pajak yang dalam hal ini adalah dana bagi hasil sumber daya alam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan di beberapa komponen dana perimbangan yaitu pada komponen dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan komponen dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) masing-masing mencapai Rp.190.145.000.000,00, Rp.49.136.000.000,00 dan Rp.773.740.768.936,00 atau masing-masing sebesar 15%, 4,02% dan 63,31% dari total dana perimbangan sedangkan berbeda halnya dengan komponen dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan komponen bantuan keuangan provinsi pada tahun 2006 yang masing-masing hanya sebesar Rp.144.827.166.400, Rp.12.109.900.000,00 dan

Rp.14.857.399.155,00 atau sebesar 13,34%, 1,12% dan 1,37% dari total dana perimbangan.

Kenaikan beberapa komponen dana perimbangan tersebut tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah walaupun jumlah dana perimbangan secara total mengalami kenaikan. Sebaliknya, penurunan pada komponen dana bagi hasil pajak yang cukup signifikan yaitu sebesar 67,07% dari total dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap penurunan rasio dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berupaya lebih giat lagi untuk dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pihak luar yakni dari transfer pusat dan provinsi.

Secara keseluruhan dari analisis rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki

kontribusi yang besar atau signifikan terhadap pengalokasian untuk belanja daerah. Hal ini berarti bahwa sumber dana yang berasal dari dana perimbangan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat besar dan memiliki rasio rata-rata 93,49% per tahun dengan mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 4 tahun. Hal ini dikarenakan beberapa komponen sumber dana perimbangan masih mencapai angka yang relatif besar.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus lebih mengoptimalkan lagi upayanya dalam mengurangi ketergantungannya terhadap dana dari pihak luar untuk membiayai kegiatan pemerintahannya (belanja

daerahnya) sehingga dalam jangka panjang ketergantungan fiskal ini dapat dikurangi, jika hal ini dapat terlaksana maka tujuan otonomi daerah berupa mewujudkan kemandirian daerah akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

### **Analisis Trend Dana Perimbangan dalam Belanja Daerah**

Analisis ini menunjukkan tingkat kecenderungan arah perkembangan penggunaan dana perimbangan dalam pengalokasian belanja daerah secara total dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar. Analisis ini menggambarkan arah ketergantungan suatu pemerintah daerah tersebut dalam membiayai belanja daerahnya baik itu belanja rutin maupun yang bersifat pembangunan.

**Tabel 3. Perhitungan Rumus Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004-2005**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (Y)</b>	<b>Tahun (X)</b>	<b>XY</b>	<b>X<sup>2</sup></b>
2004	95,77	-3	-287,31	9
2005	96,58	-1	-96,58	1
2006	96,31	1	96,31	1
2007	85,30	3	255,90	9
<b>Total</b>	<b>373,96</b>	<b>0</b>	<b>-31,68</b>	<b>20</b>

Nilai a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{373,96}{4} = 93,49$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-31,68}{20} = -1,58$$

$$Y' = 93,49 - 1,58X$$

Dengan demikian dapat dicari nilai trendnya sebagai berikut :

**Tabel 4. Perhitungan Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004-2005**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>X</b>	<b>bX</b>	<b>X<sup>2</sup></b>
2004	93,49	1,58	-3	-4,74	98,23
2005	93,49	1,58	-1	-1,58	95,07
2006	93,49	1,58	3	1,58	91,91
2007	93,49	1,58	1	4,74	88,75

Persamaan trend diatas yaitu  $Y' = 93,49 - 1,58X$  menunjukkan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah cukup besar yaitu rata-rata 93,49% dengan mengalami penurunan sebesar 1,58 tiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 93,49% dananya berasal dari dana perimbangan.

Dari perhitungan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun (2004-2007) trend dana perimbangan terhadap belanja daerah semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya trend yang mengarah ke kanan bawah dari tahun ke tahun,

walaupun penurunan ini masih dalam angka yang cukup rendah akan tetapi hal ini sangat signifikan dalam menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat ataupun Provinsi. Trend yang semakin menurun ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin mengurangi sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Dengan demikian apabila trend ini terus terjadi dalam jangka panjang maka tingkat kemandirian

fiskal yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan dapat tercapai dan ketergantungannya terhadap transfer dari pusat pun semakin dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin giat dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri misalnya dengan mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dapat kita lihat rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah (Y) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Trend yang semakin menurun ini diiringi dengan penurunan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah pada tahun 2006 dan 2007 bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2005.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah masih sangat rendah yaitu rata-

rata 23,4% dengan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,11% tiap tahunnya. Sedangkan sebagian besar belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 93,49% dananya berasal dari dana perimbangan. Sedangkan kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah sangat tinggi yaitu rata-rata 93,49% dengan mengalami penurunan sebesar 1,58% tiap tahunnya.

- b. Trend Pendapatan Asli Daerah yang semakin meningkat dan dana perimbangan yang semakin menunjukkan bahwa perkembangan kemandirian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah berusaha mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah yaitu tercapainya kemandirian fiskal suatu daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin telah berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap transfer dari pusat/provinsi dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat menciptakan dan menggali lebih banyak potensi yang berasal dari daerahnya sendiri.

- c. Rasio PAD terhadap belanja daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan asli daerahnya secara total. Selama kurun waktu empat tahun (2004-2007) peningkatan/penurunan rasio PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah 25% per tahun yaitu hanya sebesar 2,36% per tahun sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah bersifat intruktif yang berarti tingkat kemandirian Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah.

- d. Rasio dana perimbangan terhadap belanja daerahnya sangat dipengaruhi oleh besarnya komponen-komponen dana perimbangan itu sendiri dan juga besarnya pengalokasian untuk jumlah belanja daerah secara total. Hal ini dikarenakan peningkatan/penurunan dari jumlah dana perimbangan tetapi sebaliknya selama kurun waktu empat tahun jumlah dana perimbangan selalu mengalami peningkatan.

- e. Penelitian ini hanya meneliti masalah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Pemerintah.

## **2. Saran**

- a. Sebaiknya untuk meningkatkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sector pajak dan retribusi daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta lebih meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang

bersumber dari bagian laba dan badan usaha daerah.

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus lebih mengoptimalkan lagi upayanya dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pusat berupa dana perimbangan dan bantuan dari provinsi sehingga trend dari ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam jangka panjang akan menunjukkan penurunan yang lebih tajam lagi dan pada akhirnya akan menunjukkan penurunan yang lebih tajam lagi dan pada akhirnya akan mendorong pada terwujudnya tujuan otonomi daerah yang berupa kemandirian fiskal.
- c. Bagi yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan sumber dana berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam membiayai belanja daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melanjutkan penelitian dengan menggunakan jangka waktu yang lebih sehingga akan memberikan dampak dari

kebijakan desentralisasi yang lebih nyata.

- d. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya variabel yang diteliti diharapkan berbeda.

## DAFTAR RUJUKAN

- Baswir, Revrison, 1999, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, diterjemahkan Oleh Masri Maris, UI-Press Jakarta
- Damayanti, 2000. *Pengembangan Pendapatan Asli Daerah sebagai Upaya Pengisian Otonomi pada Daerah Kotamadya Palembang*. Tidak dipublikasikan.
- Deddi Nordiawan, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Salemba Empat.
- Engelina, Rita, (2001). *Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah dalam Menunjang Akuntansi Manajemen pada Dinas Pendapatan Daerah (Dalam Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah) UPP AMP YKPN, Yogyakarta*.
- Gunawan Adi Saputra, 2003. *Anggaran Perusahaan Negara*, Jakarta, Erlangga.
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Indrianto Nur dan Ba,bang Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta, BPFE.
- Kamaruddin Ahmad, 2005. *Efektifitas Anggaran*, Jakarta, Erlangga.

- Kurniadi, 2006. *Peranan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perekonomian pada Provinsi Sumatera Selatan*, Tidak dipublikasikan.
- Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Syahrudin, H, 2001.b *Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Workshop Manajemen Strategik dan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Widodo, 2001. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali (Dalam Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah)* UPP AMP YKPN, Yogyakarta.